

**ANALISIS KINERJA BELANJA DALAM LAPORAN REALISASI  
ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET KABUPATEN DELI SERDANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**Nama : SAMSIDAR ALFIRA LUBIS  
NPM : 1405170721  
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 23 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : SAMSIDAR ALFIRA LUBIS  
N P M : 1405170721  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA BELANJA DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN DELI SERDANG

Dinyatakan : (C) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si

Penguji II

M. FIRZA ALPI, S.E., M.Si

Pembimbing

Drs. MARNOKO, M.Si

**PANITIA UJIAN**

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

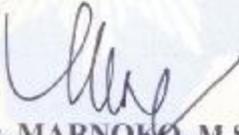
Skripsi ini disusun oleh:

Nama : SAMSIDAR ALFIRA LUBIS  
N P M : 1405170721  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN  
Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA BELANJA DALAM LAPORAN REALISASI  
ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET KABUPATEN DELI SERDANG

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

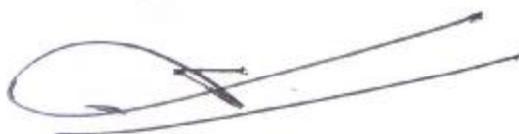
  
(Drs. MARNOKO, M.Si)

Diketahui/Disetujui  
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

  
(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

  
(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

## PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samsidar Alfira Lubis

NPM : 1405170721

Program : Starta I

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi (Manajemen)

Judul : **Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Deli Serdang**

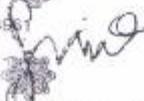
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi adalah benar saya peroleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Deli Serdang

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini saah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



  
Samsidar Alfira Lubis



## **ABSTRAK**

**SAMSIDAR ALFIRA LUBIS. NPM. 1405170721. Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Deli Serdang, 2018. Skripsi.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja belanja yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang yang dilihat dari laporan realisasi anggaran tahun 2012-2016

Pendekatan penelitian ini berupa dekatan deskriptif yaitu dimana dalam penelitian ini penulis menggambarkan hasil perhitungan dan grafik Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Deli Serdang. Kemudian dari grafik tersebut ditarik kesimpulan yang berhubungan dengan kinerja belanja.

Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan analisis varians belanja dikatakan baik. Dari segi analisis belanja operasi terhadap total belanja daerah, belanja daerah mengalami peningkatan. Sedangkan dari analisis belanja modal terhadap total belanja daerah belanja modal untuk tahun 2013 rasio belanja langsung mengalami penurunan sebesar 17,31 %. Dilihat dari rasio efesiensi belanja, kinerja belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang cukup efisien dan Pemerintah Daerah dapat melakukan penghematan.

***Kata Kunci : Kinerja Belanja, Varians Belanja, Efesiensi Belanja***

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alakum Wr.Wb*

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penulis kesehatan,kesempatan,dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam rangka kelengkapan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Dalam menulis skripsi ini,penulis banya mendapatkan bantuan,dukungan,dan nasehat-nasehat yang sangat berharga dari berbagi pihak sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Pada kesempatan ini,penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Datong Lubis dan Ibunda Rasati tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.
2. Abang dan adik-adik tercinta,Danu Syahputra Lubis yang selalu membantu dan memberikan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan proposal ini, Akbar Ramansyah Lubis dan Faisal Maulana Lubis yang selalu memberikan dukungan dan semangat.

3. Bapak Dr.Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri, SE., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE.,M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammdiyah sumatera Utara
6. Bapak Drs.Marnoko, M.Si selaku dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Kepala Bagian dan Kepala Bidang beserta pegawai Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Deli yang telah memberikan kesempatan dan izin penelitian kepada penulis.
8. Sahabat-sahabat penulis,Siti Nurainun,Sarah,Rini,Dina,Anggi,teman-teman di kelas Akuntansi F sore,Santri,Minta,Nurasiah,Raina,Kak Mia yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan masukan untuk skripsi ini.Semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi Mahasiswa Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Medan, Maret 2018

Penulis

**Samsidar Alfira Lubis**

**NPM:1405170721**

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Peneliti .....	9
<b>BAB II. LANDASAN TEORI</b>	
A. Uraian Teori .....	10
1. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah .....	11
2. Belanja Daerah.....	14
3. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik.....	18
4. Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik.....	20
5. Laporan Realisasi Anggaran .....	20
6. Kinerja .....	21
7. Penelitian Terdahulu .....	22
B. Kerangka Konseptual.....	23
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian.....	25
B. Defenisi Operational Variabel.....	25
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	27
D. Jenis Data dan Sumber Data.....	28

E. Defenisi Operational Variabel.....	28
F. Teknik Pengumpulan Data .....	29
G. Tenik Analisis Data. ....	29

#### **BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	.31
B. Pembahasan .....	40

#### **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	42
B. Saran .....	44

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1-1 Anggaran dan Realisasi Belanja selama periode 2012-2016

Tabel 3.1 Waktu Penelitian.

Tabel 4.1 Anggaran dan Realisasi Belanja selama periode 2012-2016

Tabel 4.1.1 Analisis Varians Belanja 2012-2016.

Tabel 4.1.2 Analisis Belanja Operasional Terhadap Belanja Daerah 2012-2016.

Tabel 4.1.3 Analisis Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah 2012-2016.

Tabel 4.1.4 Analisis Efisiensi Belanja Tahun 2012-2016.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberikan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan bangsa dan negara. Tujuan utama dari suatu pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan layanan tersebut dimasa yang akan datang. Pelayanan peningkatan tersebut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh terpadunya kontribusi beberapa faktor, seperti pemberdayaan PAD, laju pertumbuhan penduduk, kontribusi angkatan kerja, dan lain-lain. Untuk mencapai suatu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, strategi dan kebijakan ekonomi pembangunan harus fokus pada sektor-sektor strategis dan potensial pada wilayah tersebut baik sektor riil, finansial, maupun infrastruktur agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan juga sangat penting dilakukan secara berkala melalui sajian data statistik yang berkualitas.

Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi disuatu daerah. Oleh karena itu,

evaluasi terhadap APBD sangat diperlukan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah setiap periode, sehingga pemerintah terpacu untuk meningkatkan kinerjanya di tahun depan.

Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan. Salah satunya pengukuran kinerja pada belanja daerah karena ini bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo, 2004:182).

Belanja daerah tersebut juga mencerminkan kebijakan menghasilkan pendapatan merupakan suatu hal yang lebih sulit dibandingkan membelanjakan. Karena sifat belanja yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran, maka perencanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap belanja sangat penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan ke depan (Mahmudi 2010: 155). Rasio efektivitas dan efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja

ini di gunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah, berupa angka efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibandingkan tahun lalu. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari seratus persen (100%). Sebaliknya jika melebihi seratus persen (100%) maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp.491.710.226.082,82 atau 73,52% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.668.814.619.240,00. Dengan demikian, anggaran untuk Belanja Modal yang tidak direalisasikan sebesar Rp.177.104.393.157,18 atau 26,48%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2014, nilai realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2015 mengalami penurunan sebesar Rp.61.995.663.900,09 atau 11,20%. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap. Untuk mengetahui seberapa besar anggaran dan realisasi terwujud dalam suatu instansi dapat dilihat melalui seberapa jauh pemenuhan pada belanja kegiatan yang digunakan oleh instansi. Misalnya dengan melihat pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik atau tidak. Pengukuran kinerjanya dapat menggunakan Analisis Pertumbuhan Belanja. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah, akan dilihat

apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah. Berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan, masyarakat secara tidak langsung dapat melakukan pengawasan atau pengendalian. (Mahsun: 2012).

Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dibidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi akan dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Perubahan yang paling diinginkan adalah adanya standar akuntansi pemerintahan. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sesungguhnya adalah dalam rangka meningkatkan kuantitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga *good governance* dapat tercapai.

Pengembangan sebuah sistem yang dianggap tepat untuk dapat diimplementasikan menghasilkan suatu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SIKAD) yang diharapkan dapat mengganti sistem akuntansi. Dengan ini diharapkan transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dicapai. Adapun manfaat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (2010:11) adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan yang baik. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah Nomor

71 Tahun 2010 pada bulan Oktober tahun 2010. Peraturan pemerintah tentang SAP berbasis akrual ini menjadi dasar bagi semua entitas pelaporan dalam menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban kepada berbagai pihak khususnya pihak diluar eksekutif.

Upaya kongkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelolaan keuangan Negara menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No. 1 tentang perbendaharaan menegaskan atas pelaksanaan APBD, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Menurut Dedi Nordiawan (2010:122) Laporan realisasi anggaran adalah Laporan yang menyajikan ikhitsar sumber, alokasi dan pemakain sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah (pusat atau daerah), dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Jika dibandingkan dengan neraca LRA menduduki prioritas yang lebih penting dan LRA

ini merupakan jenis laporan keuangan daerah yang paling dahulu dihasilkan sebelum membuat laporan neraca, laporan operasional serta laporan arus kas.

Anggaran dalam pemerintah merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu, LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dinilai paling utama. Berdasarkan LRA tersebut pembaca laporan dapat membuat analisis kinerja laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja dan analisis pembiayaan.

Pemerintah kabupaten Deli Serdang menyajikan laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember sebagai unsur laporan pertanggungjawaban Bupati untuk tahun anggaran. Laporan keuangan Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2012 s/d 2016 sesuai dengan ketentuan untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah telah disajikan berbasis akrual merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang telah dikelola oleh Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang.

**Tabel 1.1**

**Anggaran dan Realisasi Belanja selama periode 2012-2016**

			URAIAN			
			Belanja Operational	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Transfer
TAHUN	2012	Anggaran	1.568.901.440.874,00	427.897.492.475,00	2.500.000.000,00	24.806.007.269,00
		Realisasi	1.465.593.836.006,90	334.245.373.140,00	1.438.650.200,00	24.783.566.712,55
	2013	Anggaran	1.802.968.752.981,41	402.766.879.293,00	2.500.000.000,00	29.216.007.300,00
		Realisasi	1.652.297.628.088,59	352.334.308.750,00	874.544.730,00	29.216.007.300,00
	2014	Anggaran	1.988.700.325.302,57	649.760.068.683,00	2.500.000.000,00	30.524.607.300,00
		Realisasi	1.807.241.575.116,30	553.705.889.982,91	2.500.000.000,00	30.524.606.749,97
	2015	Anggaran	2.252.286.262.563,21	668.814.619.240,00	2.500.000.000,00	270.730.342.816,00
		Realisasi	1.972.405.057.480,73	491.710.226.082,82	1.336.426.095,00	270.730.342.816,00
	2016	Anggaran	2.688.738.600.196,08	692.809.977.017,00	2.500.000.000,00	-
		Realisasi	2.443.150.929.029,43	561.285.600.326,63	998.857.488,00	

Berdasarkan tabel diatas,dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 anggaran dan realisasi belanja pada instansi khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Kab.Deli Serdang mengalami peningkatan.Dalam hal ini perubahan dan pertumbuhan dari penggunaan anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam penilaian kinerja yang ada pada instansi. Dari pertumbuhan penggunaan anggaran dan realisasi dapat menjelaskan sejauh mana efektivitas dan efisiensi dari penyerapan penggunaan anggaran pada pembiayaan kegiatan yang ada dalam periode satu tahun anggaran.Pada TA 2016 secara umum realisasi belanja tidak melebihi anggaran yang telah di tetapkan,dimana jumlah realisasi belanja pemerintah Kabupaten Deli Serdang TA 2016 adalah sebesar Rp.3.005.435.386.844,06 atau 88,8% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.384.048.577.213,08.Nilai realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp.269.811.031.873,15 atau 9,86% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2015.

Keterkaitan antara Anggaran dan Realisasi memberikan gambaran bagaimana sebuah instansi dapat dikatakan efektif atau tidak dalam pengambilan keputusan penganggaran dan pembiayaan tata laksana kegiatan isntansi selama satu tahun anggaran tersebut.Dengan alat ukur berupa analisis yang ada didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisa kinerja anggaran belanja.Untuk mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nominal ataupersentasenya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) belanja yang disajikanakan terlihat sejauh mana kefeektifan dan penyerapan anggaran untuk aktivitas instasi selama satu tahun anggaran tersebut.Pengukuran kinerja anggaran ini dapat menggunakan Rasio Efisiensi

Belanja. Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran. Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai: **"Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Kabupaten Deli Serdang"**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat didefinisikan masalah sebagai berikut:

1. Terjadinya peningkatan belanja operasi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016
2. Pada tahun 2015 nilai realisasi belanja modal mengalami penurunan di bandingkan dengan tahun 2014.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis membuat perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana kinerja belanja yang ada pada Badan Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja belanja operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui Kinerja belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keunagan Dan Aset Kabupaten Deli Serdang.

### **Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Bagi peneliti,memberikan pengetahuan dan wawasan penulis tentang bagaimana cara menganalisi laporan keuangan mengenai anggaran dan realisasi belanja yang terdapat di laporan realisasi anggaran
2. Bagi instansi, dapat memberikan saran dalam menentukan kebijaksanaan yang akan diambil dalam menentukan anggaran pada tahun yang akan datang.Juga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menentukan kebijakan pengelolaan dan peningkatan kinerja dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
3. Bagi pihak lain,dapat menjadi bahan acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama serta memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Analisis Kinerja Belanja Dalam LRA.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian teori**

##### **1. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah**

Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Adanya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antarap pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Akan tetapi sela menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan RI. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. SAPD memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yaitu:

##### **a. Basis Kas**

SAPD menggunakan basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual untuk neraca. Dengan basis kas, pendapatan diakui dan dicatat pada saat kas diterima oleh rekening Kas Daerah serta belanja diakui dan dicatat pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.

Aset, Kewajiban, dan Ekitas Dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah.

b. Sistem Pembukuan Berpasangan

Sistem Pembukuan Berpasangan (double entry system) didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu:  $Aset = Utang + Ekuitas\ Dana$ . Setiap transaksi dibukukan dengan mendebit suatu perkiraan dan mengkredit perkiraan yang lain. SAPD terdiri dari 2 subsistem, yaitu:

1.) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem Pemerintah akuntansi Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD), yang akan mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh level Pemerintah Daerah, seperti pendapatan dana perimbangan, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, transaksi-transaksi pembiayaan, pencatatan investasi, dan utang jangka panjang.

## **2. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD. Transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja harus dicatat dan dilaporkan oleh PPK SKPD.

Dalam struktur pemerintahan daerah, satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan pencatatan atas transaksi – transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, asset, dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkan dokumendokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara (Nordiawan : 2008) Laporan keuangan yang harus dibuat oleh SKPD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD).PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (Kepala SKPKD) yang bertugas mengelolah APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PKK-SKPD).PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.PKK-SKPD

mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan atas beaharaan penerimaan dan bendahara pengeluaran

Penyusunan laporan keuangan harus dihasilkan melalui suatu sistem dan prosedur yang lazim. Di dalam Pasal 6, PP 8/2006 dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintahan dihasilkan dari suatu sistem akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Terdapat dua komponen laporan keuangan yang dihasilkan secara langsung dari sistem (proses) akuntansi yaitu neraca dan laporan operasional (LO) atau laporan realisasi anggaran (LRA). LAK (laporan arus kas), LPE, LP SAL, dihasilkan melalui analisis dari neraca, LO dan LRA sedangkan CaLK tidak dapat dihasilkan secara langsung (otomatis) dari sistem (proses) akuntansi, karena informasi di dalam CaLK bersifat kuantitatif/keuangan maupun kualitatif/deskriptif.

Bahkan informasi dalam CaLK juga mencakup informasi non-akuntansi dan bisa dilengkapi dengan berbagai macam tabel maupun grafik yang dianggap relevan. Suatu sistem akuntansi pemerintahan setidaknya mengatur mengenai format laporan keuangan, kebijakan akuntansi, prosedur akuntansi, bagan akun standar, jurnal standar, entitas pelaporan dan entitas akuntansi, dokumen transaksi yang digunakan. Penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) tersebut harus mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

### **3. Belanja Daerah**

Pengertian Belanja menurut PSAP No.2, Paragraf 7 (dalam Erlina dkk , 2008) adalah:

“Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah ”.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Peraturan 19 Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua.

“Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih ”.

Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Pengeluaran pemerintah daerah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dipenuhi oleh swasta. Sedangkan pengeluaran pemerintah itu sendiri tidak begitu saja dilaksanakan oleh suatu pemerintah daerah, tapi harus direncanakan terlebih dahulu. Pada ketentuan UU No.33 Tahun 2004 telah diatur beberapa aspek yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu yang diatur dalam ketentuan ini yaitu permasalahan belanja daerah. Menurut UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, belanja daerah dimaksudkan sebagai semua kewajiban daerah

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi:

1. Belanja Operasi.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat / daerah yang member manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi:

- a. Belanja pegawai,
- b. Belanja barang,
- c. Bunga,
- d. Subsidi,
- e. Hibah,
- f. Bantuan sosial.

2. Belanja Modal.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja Modal meliputi:

- a. Belanja modal tanah,
- b. Belanja modal peralatan dan mesin,
- c. Belanja modal gedung dan bangunan,
- d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan,
- e. Belanja modal aset tetap lainnya,
- f. Belanja aset lainnya (aset tak berwujud)

### 3. Belanja Lain-lain/belanja Tak Terduga.

Belanja lain-lain atau belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

### 4. Belanja Transfer.

Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten /kota serta dana bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa. Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja dikelompokkan menjadi:

1. Belanja Langsung.

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja:

- a. Belanja pegawai,
- b. Belanja barang dan jasa,
- c. Belanja modal.

2. Belanja Tidak Langsung.

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. Belanja pegawai,
- b. Belanja bunga,
- c. Belanja subsidi,
- d. Belanja hibah,
- e. Belanja bantuan sosial,
- f. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

Secara teoritis, terdapat dua pendekatan yang berbeda dalam pendelegasian fungsi belanja, yaitu pendekatan “pengeluaran” dan pendekatan “pendapatan”. Menurut pendekatan “pengeluaran”, kewenangan sebagai tanggung jawab antar tingkat

pemerintahan dirancang sedemikian rupa agar tidak saling timpang tindih. Pendelegasian ditentukan berdasarkan kriteria yang bersifat obyektif, seperti tingkat lokalitas dampak dari fungsi tertentu, pertimbangan keseragaman kebijakan dan penyelenggaraan, kemampuan teknik dan manajerial pada umumnya, pertimbangan faktor-faktor luar yang berkaitan dengan kewilayahan, efisiensi dan skala ekonomi, sedangkan menurut pendekatan “pendapatan” , sumber pendapatan publik dialokasikan antar berbagai tingkat pemerintah yang merupakan hasil dari tawar-menawar politik. Pertukaran iklim politik sangat mempengaruhi dalam pengalokasian sumber dana antar tingkat pemerintahan. Selanjutnya, meskipun pertimbangan prinsip di atas relevan, namun kemampuan daerah menjadi pertimbangan yang utama.

#### **4. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Halim (2012:5) menyebutkan karakteristik akuntansi sektor publik sebagai berikut:

1. Pemerintah tidak berorientasi laba.
2. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.
3. Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempengaruhi lebih dari satu jenis dana.

4. Akuntansi pemerintahan membukukan pengeluaran modal seperti untuk membangun gedung, dan mengadakan kendaraan dalam perkiraan neraca dan hasil operasional.
5. Akuntansi pemerintah tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan di neraca.

Dibandingkan dengan organisasi lain, menurut Siregar (1998:61) organisasi sektor publik memiliki karakteristik unik yaitu:

1. Motif mencari laba bukan merupakan orientasi utama. Karena orientasi utama adalah peningkatan mutu layanan, sehingga laba bukan merupakan orientasi utama yang ingin dicapai sehingga tidak diadakan perhitungan dan pelaporan laba.
2. Dimiliki secara kolektif oleh masyarakat, dan kepemilikan tidak dibuktikan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan. Karena segala yang bersifat pribadi tidak ditemui dalam organisasi sektor publik.
3. Sumber keuangan yang diberikan warga negara tidak secara langsung berhubungan dengan jasa yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya warga negara membayar pajak kepada pemerintah, warga negara tersebut tidak secara langsung memperoleh layanan dari pemerintah.

#### **4. Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik**

Soetjipto (2011:61) menyatakan secara umum tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik diuraikan sebagai berikut:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan
2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif
3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi
4. Kelangsungan Organisasi
5. Hubungan Masyarakat
6. Sumber Fakta dan Gambaran

#### **5. Laporan Realisasi Anggaran**

Standar Akuntansi Pemerintahan (2010: 70) menyebutkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislative dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Manfaat Laporan Relisasi Anggaran yaitu untuk menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dan menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai

kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif

## 6. Kinerja

Menurut (Bastian:2006) “Kinerja adalah:

“Gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,tujuan,misi dan visi organisasi.Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan”.

Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian, karena organisasi dapat menetapkan *reward&punishment*.Tujuan sistem pengukuran kinerja yaitu untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik, menyeimbangkan ukuran kinerja finansial & non-finansial, mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan dibawah, serta memotivasi pencapaian *goal congruence*,alat mencapai kepuasan individu maupun kolektif yang rasional. Manfaat pengukuran kinerja adalah memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward & Punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati, sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi,

membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah dan memastikan bahwa pengambilan dilakukan secara objektif (Palilingan, 2015).

### 7. Penelitian Terhadulu

Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Grace.Y.Liando (2016)	Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Analisis Varians Belanja, Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Daerah, Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah, Rasio Efisiensi Belanja	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja belanja dinilai baik dan pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam pemanfaatan realisasi belanja.

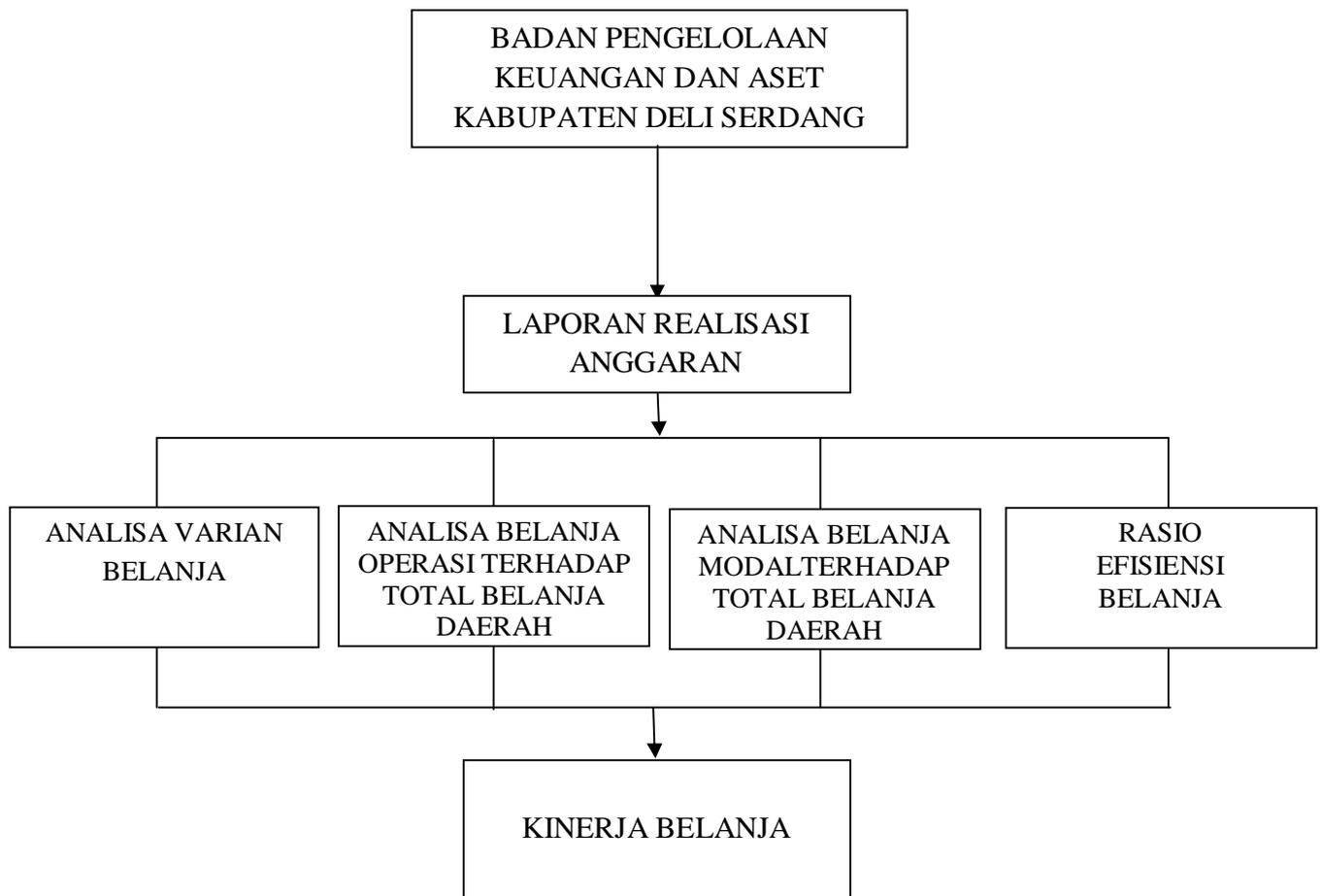
Ayu Wardiyah (2015)	Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Palembang	Analisis Varians Belanja, Analisis Pertumbuhan Belanja, Analisis Keserasian Belanja, Analisis Rasio efektivitas Dan Efisiensi Belanja	Hasil kinerja anggaran belanja Bappeda kot Palembang bedasarkan laporan realisas anggaran tahun 200: sampai dengan 201: sudah cukup baik.
------------------------	--	---	---

### B. Kerangka Konseptual

Dalam mengamati kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memprediksi sumber daya ekonomi, salah satu yang terpenting yaitu laporan realisasi anggaran. Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta resiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu, laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerangka berfikir merupakan unsur-unsur pokok dalam penelitian dimana konsep teoritis akan berubah kedalam defenisi operasional yang dapat

menggambarkan rangkaian variabel yang akan diteliti. Maka berdasarkan teori yang telah diuraikan, maka penulis dapat menggambarkan kerangka berfikir sebagai berikut:



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang hanya mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikan dan menafsirkan data sehingga dapat mengetahui gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini tidak memerlukan hipotesis.

Penulis hanya mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data sehingga peneliti mengetahui mengenai masalah apa yang akan diteliti. Data yang digunakan peneliti adalah laporan realisasi anggaran (LRA).

#### **B. Defenisi Operasional Variabel**

Definisi operasional bertujuan untuk melihat sejauh mana variabel-variabel dari suatu faktor yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian dan faktor-faktor lainnya. Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah:

1. Kinerja adalah hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

2. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Adapun metode analisis dalam penelitian dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan alat analisis berikut (Sugiyono, 2011:67) :

1. Analisis Varians Belanja (Selisih Belanja)

Merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Berdasarkan laporan realisasi anggaran kinerja pemerintah daerah dinilai baik apabila jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal ini adanya kinerja yang kurang baik.

2. Analisis Belanja Operasional Terhadap Total Belanja Daerah

Analisi belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Rasio belanja operasional dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Ops terhadap Belanja Daerah} = \frac{\text{Total Belanja Operational}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

### 3. Analisa Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Pengklasifikasian belanja modal adalah klasifikasi berdasarkan jangka waktu manfaat yang dinikmati atas belanja tersebut. Rasio belanja modal dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

### 4. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standart baku untuk rasio ini. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja t}}{\text{Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$

## C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang, yang beralamat di Jln.Mawar No.8 Lubuk Pakam, 20514 Fax: (061) 7956152

#### D. Waktu penelitian

Waktu penelitian dimulai pada bulan november 2017 sampai dengan bulan maret 2018, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

No	Keterangan	Bulan/Minggu																			
		November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan Data	■	■	■	■																
2	Pengajuan Judul				■																
3	Penyusunan Proposal					■	■	■	■												
4	Seminar Proposal									■	■	■	■								
5	Pengesahan Proposal													■	■	■	■				
6	Penyelesaian Skripsi																	■	■	■	■

#### E. Jenis Data dan Sumber Data

##### Jenis Data

Data adalah keterangan atau sumber informasi mengenai objek yang akan diteliti dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka-angka, berupa data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setiap satu tahun anggaran.

##### Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan melakukan wawancara pada perusahaan sebagai objek penelitian
2. Data sekunder, yaitu data yang berupa catatan-catatan perusahaan dan lampiran-lampiran dan literature yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Tenik yang digunakan dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penulisan adalah sebagai berikut:

1. Teknik Dokumentasi,yaitu dengan melalui pencatatan ataupun memperbanyak atas data-data sekunder untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian
2. Teknik Kepustakaan,yaitu dengan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dari buku diperpustakaan,jurnal akuntansi,dan sumber-sumber lain yang dapat mendukung keakuratan data.

## **G. Teknik Analisis Data**

Setelah melakukan pengumpulan data, data di analisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh dan data yang didapat selama proses penelitian . adapun tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tahap pengumpulan data

Proses pengumpulan data dilakukan menurut data yang diperlukan, seperti laporan realisasi anggaran

2. Tahap menghitung dan menganalisis data

Setelah data-data hasil penelitian yang diperoleh terkumpul, kemudian di analisa dalam tahap analisis data.Penulis menguraikan hasil analisis dari belanja serta bagaimana kinerjanya terhadap laporan realisasi anggaran.

### 3. Penarikan kesimpulan.

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 184 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 101 tentang Pengelolaan keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 pasal 15 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang antara lain menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat enam bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyajikan laporan keuangan yang berakhir per 31 desember sebagai unsur laporan pertanggungjawaban Bupati. Laporan keuangan Kabupaten Deli Serdang sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintahan telah disajikan berbasis akrual merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pemerintah kabupaten Deli Serdang.

## 2. Gambar Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Deli Serdang berada mengelilingi kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 2.497,72 km<sup>2</sup>. Jumlah kecamatan sebanyak 22 kecamatan, 390 desa, dan 14 kelurahan dengan panjang garis pantai sepanjang ± 65 km.

Sejarah geografis, Kabupaten Deli Serdang (setelah dimekarkan pada tahun 2003) terletak pada posisi 02057'-3016' Lintang Utara dan 98027'-98033' Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Deli Serdang terletak di wilayah pantai timur Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Simalungun
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Serdang Berdagai
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karo dan kabupaten Langkat

Secara geomorfologi, komposisi penggunaan lahan di Kabupaten Deli Serdang terdiri dari perkebunan (perkebunan besar dan perkebunan rakyat), permukiman, sawah, dan tegalan/kebun campuran. Kondisi demografi di Kabupaten Deli Serdang ditandai dengan terdapatnya berbagai etnis atau suku bangsa yang tersebar di 22 kecamatan.

## 3. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Visi pemerintah Kabupaten Deli Serdang adalah **“Deli Serdang yang Maju dengan Masyarakatnya yang Religius, Sejahtera, Bersatu dalam Kebhinekaan**

**Melalui Pemertaan Pembangunan, Pemanfaatan Sumber Daya yang Adil dan Penegakan Hukum yang Ditopang oleh Tata Pemerintahan Yang Baik”.**

Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menetapkan misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Deli Serdang yang maju adalah mendorong pembangunan yang menjamin pemerataan yang seluas-luasnya didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang maju, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan yang berwawasan lingkungan, serta didukung oleh kondisi keamanan yang kondusif.
- b. Mewujudkan masyarakat Deli Serdang yang religius adalah dorongan pembangunan akhlak mulia generasi muda, saling menghormati, rukun dan damai, tidak diskriminatif, mengabdikan pada kepentingan masyarakat luas, dan menghormati hak asasi manusia.
- c. Mewujudkan masyarakat Deli Serdang yang sejahtera dan bersatu dalam kebhinekaan adalah dorongan pembangunan yang merata, pemanfaatan sumber daya yang adil guna mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, rasa aman dan damai, maupun menampung aspirasi masyarakat yang dinamis, menegakan persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan dengan ditopang oleh tata pemerintahan yang baik
- d. Penegakan hukum dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah dorongan terciptanya supremasi hukum dan masyarakat yang taat hukum, menghilangkan praktek diskriminasi hukum, mendorong pembangunan

sistem yang akuntabel, transparan, profesional, dan mampu menjalankan fungsinya sebagai fasilitator bagi semua *stakeholder*.

#### 4. Perhitungan Dan Analisis Data

##### a. Analisis Varians Belanja

Anlisis varians merupakan anlisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Analisis varians cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang sangat berati. Rumus yang digunakan:

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi} - \text{Anggaran}$$

**Tabel 4.1**  
**Anggaran Dan Realisasi Belanja**  
**Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Deli Serdang Tahun**  
**2012-2016**

			URAIAN			
			Belanja Operational	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Transfer
TAHUN	2012	Anggaran	1.568.901.440.874,00	427.897.492.475,00	2.500.000.000,00	24.806.007.269,00
		Realisasi	1.465.593.836.006,90	334.245.373.140,00	1.438.650.200,00	24.783.566.712,55
	2013	Anggaran	1.802.968.752.981,41	402.766.879.293,00	2.500.000.000,00	29.216.007.300,00
		Realisasi	1.652.297.628.088,59	352.334.308.750,00	874.544.730,00	29.216.007.300,00
	2014	Anggaran	1.988.700.325.302,57	649.760.068.683,00	2.500.000.000,00	30.524.607.300,00
		Realisasi	1.807.241.575.116,30	553.705.889.982,91	2.500.000.000,00	30.524.606.749,97
	2015	Anggaran	2.252.286.262.563,21	668.814.619.240,00	2.500.000.000,00	270.730.342.816,00
		Realisasi	1.972.405.057.480,73	491.710.226.082,82	1.336.426.095,00	270.730.342.816,00
	2016	Anggaran	2.688.738.600.196,08	692.809.977.017,00	2.500.000.000,00	-
		Realisasi	2.443.150.929.029,43	561.285.600.326,63	998.857.488,00	

Perhitungan menggunakan rumus Analisis Varians Belanja dengan berdasarkan pada tabel 4.1 maka didapatkan kesimpulan:

**Tabel 4.1.1**  
**Analisis Varians Belanja**  
**Tahun Anggaran 2012-2016**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih	Perbandingan (%)
2012	2.024.104.940.618,00	1.826.070.426.059,45	198.034.514.558,55	90,22
2013	2.237.451.639.574,41	2.034.622.488.868,59	202.829.150.705,82	90,93
2014	2.671.485.001.285,57	2.392.252.735.840,18	279.232.265.445,39	89,55
2015	3.194.331.588.619,21	2.735.624.354.970,55	458.707.233.648,66	84,33
2016	3.384.048.577.213,08	3.005.435.386.844,06	378.613.190.369,02	88,81

*(Data Olahan)*

Di tahun 2012 penyerapan penggunaan anggaran berdasarkan pada tabel varians belanja diatas adalah sekitar Rp. 198.034.514.558,55 atau sekitar 90,22% yang menunjukkan bahwa tidak semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi terserap sepenuhnya pada pembiayaan yang berjalan selama satu periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam hal ini menyisakan perbandingan persentase sekitar 7,78 % dari penyerapan anggaran yang ada dalam realisasi anggaran belanja pada instansi.

Di tahun 2013 penyerapan penggunaan anggaran berdasarkan varians belanja adalah sekitar Rp. 202.829.150.705,82 atau sekitar 90,93 %. Dalam hal ini ada pengurangan tingkat selisih sekitar 9,07% dari realisasi anggaran yang ditetapkan pada tahun anggaran 2013.

Di Tahun 2014 penyerapan penggunaan anggaran berdasarkan varians belanja adalah sekitar Rp. 279.232.265.445,39 atau sekitar 89,55% mengalami kenaikan efisiensi penggunaan anggaran dengan selisih sebesar 10,45 %. Terlihat kenaikan penggunaan anggaran dari tahun sebelumnya.

Di tahun anggaran 2015 menunjukkan anggaran sebesar Rp. 3.194.331.588.619,21 dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.735.624.354.970,55 atau 83,44% sehingga selisih yang tidak terealisasi sebesar Rp. 458.707.233.648,66 atau 14,36%.

Di Tahun 2016 penyerapan penggunaan anggaran berdasarkan varians belanja adalah sekitar Rp. 3.384.048.577.213,08 atau sekitar 88,81% mengalami kenaikan efisiensi penggunaan anggaran dengan selisih sebesar 11,19 %.Terlihat kenaikan penggunaan anggaran dari tahun sebelumnya jika memperhatikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Jika digunakan indikator presentase pencapaian penyerapan belanja sebagai skala pengukuran kinerja keuangan dari yang sangat buruk sampai dengan yang sangat baik (0 %- 100 %), secara objektif dapat dikategorikan kinerja keuangan daerah Tahun Anggaran 2015 dari sisi capaian penyerapan belanja termaksud katagori sangat baik.

#### **b. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Daerah**

Analisis belanja operasi terhadap total belanja daerah merupakan perbandingan antara belanja operasi dengan total belanja. Rasio ini memberikan informasi mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi.

**Tabel 4.1.2**  
**Analisis Total Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Daerah**  
**Tahun Anggaran 2012-2016**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Total Belanja Operasi (Rp)</b>  <b>[a]</b>	<b>Total Belanja (Rp)</b>  <b>[b]</b>	<b>Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja (%)</b>  <b>[a/b x 100%]</b>
2012	1.465.593.836.006,00	1.826.070.426.059,45	80,26
2013	1.652.297.628.088,59	2.034.622.488.865,59	81,20
2014	1.870.241.575.116,30	2.392.252.735.840,18	78,17
2015	1.972.405.057.480,73	2.465.451.709.658,5	80,02
2016	2.443.150.929.092,43	3.005.435.386.844,06	81,29

*(Data Olahan)*

Analisis belanja operasi terhadap total belanja daerah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yaitu untuk tahun 2012 sebesar 80,26 %, tahun 2013 sebesar 81,20 %, tahun 2014 sebesar 78,17 %, tahun 2015 sebesar 80,02 %, tahun 2016 sebesar 81,29 %. Dari analisis rasio ini terlihat bahwa pada tahun 2016 belanja daerah mengalami peningkatan, namun rasio belanja langsung mengalami penurunan pada tahun 2014 yaitu sebesar 78,17 %.

#### **c. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah**

Analisis belanja modal terhadap total belanja daerah merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah.

Berdasarkan rasio ini, dapat diketahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal yang disajikan pada tabel IV.1.3 sebagai berikut:

**Tabel 4.1.3**  
**Analisis Total Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah**  
**Tahun 2012-2016**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Total Belanja Modal (Rp)</b> <b>[a]</b>	<b>Total Belanja (Rp)</b> <b>[b]</b>	<b>Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja (%)</b> <b>[a/b x 100%]</b>
2012	334.254.373.140,00	1.826.070.426.059,45	18,30
2013	352.334.308.750,00	2.034.622.488.865,59	17,31
2014	553.705.889.982,00	2.392.252.735.840,18	23,14
2015	491.710.226.082,82	2.465.451.709.658,55	19,94
2016	561.285.600.326,63	3.005.435.386.844,06	18,67

*(Data Olahan)*

Analisis belanja modal terhadap total belanja daerah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yaitu untuk tahun 2012 sebesar 18,30 %, tahun 2013 sebesar 17,31 %, tahun 2014 sebesar 23,14 %, tahun 2015 sebesar 19,94 %, tahun 2016 18,67 %. Untuk tahun 2013 rasio belanja langsung mengalami penurunan sebesar 17,31 %, sedangkan pada tahun 2014 rasio belanja langsung mengalami kenaikan sebesar 5,83 %.

#### **d. Rasio Efisiensi Belanja**

Rasio efisiensi merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat

penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Mardiasmo (2013) menyatakan bahwa bila semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria efisiensi belanja sebagai berikut :

<b>Precentage Kinerja Keuangan</b>	<b>Kriteria</b>
Lebih dari 100 %	Tidak efisien
90-100 %	Kurang efisien
80-90 %	Cukup efisien
60-80 %	Efisien
Dibawah 60 %	Sangat efisien

Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan rasio efisiensi belanja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2012 samapai dengan tahun 2016.

**Tabel 4.1.4**  
**Rasio Efisiensi Belanja**  
**Tahun 2012-2016**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Anggaran Belanja (Rp)</b>	<b>Realisasi Belanja (Rp)</b>	<b>Rasio Efisiensi Belanja (%)</b>
2012	2.024.104.940.618,00	1.826.070.426.059,45	90,22
2013	2.237.451.639.574,41	2.034.622.488.865,59	90,93
2014	2.671.485.001.285,57	2.392.252.735.840,18	89,54
2015	3.194.331.588.619,21	2.465.451.709.658,55	84,33
2016	3.384.048.577.213,08	3.005.435.386.844,06	88,81

Hasil dari perhitungan rasio efisiensi belanja, maka dapat dilihat dari mulai tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2016 anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 dan tahun 2013 persentase rasio sebesar 90,22 % dan 90,93 % termasuk dalam kategori kurang efisien.

Melalui analisis efisiensi dapat diketahui seberapa besar efisiensi dalam belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat melakukan penghematan. Peningkatan belanja terjadi dipengaruhi antara lain kenaikan harga barang penunjang kegiatan operasional dan kenaikan barang modal.

## **B. Pembahasan**

Hasil perhitungan yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Deli Serdang yang mengacu pada Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun Anggaran 2012-2016 menggunakan analisis varians belanja menunjukkan hasil bahwa kinerja belanja dinilai baik dan pemerintah terus melakukan perbaikan dalam pemanfaatan realisasi belanja dimana tahun anggaran 2012 selisih anggaran belanja dan realisasi belanja sebesar Rp. 198.034.514.558,55, tahun anggaran 2013 selisih anggaran belanja dan realisasinya menunjukkan adanya peningkatan yaitu sebesar Rp. 202.829.150.705,82. Pada tahun anggaran 2015 selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sebesar Rp. 458.707.233.648,66, pada tahun anggaran 2016 selisih anggaran belanja dan realisasinya menunjukkan adanya efisiensi atau penghematan belanja dengan selisih sebesar Rp. 378.613.190.369,02

Hasil dari analisis belanja operasi terhadap total belanja daerah menunjukkan bahwa pada tahun 2016 belanja daerah mengalami peningkatan, namun rasio belanja langsung mengalami penurunan pada tahun 2014 yaitu sebesar 78,17 %. Analisis belanja modal terhadap total belanja daerah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yaitu untuk tahun 2012 sebesar 18,30 %, tahun 2013 sebesar 17,31 %, tahun 2014 sebesar 23,14 %, tahun 2015 sebesar 19,94 %, tahun 2016 18,67 %. Untuk tahun 2013 rasio belanja langsung mengalami penurunan sebesar 17,31 %, sedangkan pada tahun 2014 rasio belanja langsung mengalami kenaikan sebesar 5,83 %.

Hasil dari perhitungan rasio efisiensi belanja, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat melakukan penghematan anggaran. Pada tahun 2012 dan tahun 2013 persentase rasio sebesar 90,22 % dan 90,93 % termasuk dalam kategori kurang efisien. . Peningkatan belanja terjadi dipengaruhi antara lain kenaikan harga barang penunjang kegiatan operasional dan kenaikan barang modal.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa kinerja belanja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Deli Serdang jika dilihat dari analisis varians belanja termasuk ke dalam kategori SANGAT BAIK untuk persentase capaian penyerapan belanja tahun anggaran 2015

Dari hasil perhitungan rasio efisiensi belanja, maka dapat dilihat dari mulai tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2016 anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 dan tahun 2013 persentase rasio sebesar 90,22 % dan 90,93 % termasuk dalam kategori KURANG EFISIEN. Kriteria efisiensi belanja dikatakan efisien jika persentase kinerja keuangannya yaitu 60-80 %.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari analisis varians pada laporan realisasi anggaran untuk tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2016 dinilai baik dan menunjukkan bahwa adanya penghematan penggunaan realisasi anggaran. Akan tetapi aktifitas penggunaan peyerapan anggaran masih belum terserap sepenuhnya. Untuk itu Pemerintah Daerah khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Deli Serdang akan terus melakukan perbaikan setiap tahun dalam pemanfaatan realisasi belanja.
2. Berdasarkan dari analisis keserasian untuk belanja operasi terhadap total belanja daerah dari tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan total belanja meningkat pesat namun untuk total belanja operasional tidak meningkat secara signifikan. Pada rasio belanja langsung mengalami penurunan pada tahun 2014.
3. Berdasarkan dari analisis keserasian untuk belanja modal terhadap total belanja daerah maka dapat disimpulkan bahwa dari lima periode tahun anggaran tersebut dapat dikatakan sudah baik, karena dianggap berhasil menggunakan penyerapan anggaran belanja yang difokuskan pada belanja langsung yang merupakan belanja yang di prioritaskan pada program-

program pembangunan dan pelayanan publik dari pada penggunaan pada pembiayaan belanja tidak langsung. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan mulai dari tahun 2012 ,berbanding terbalik dengan dengan belanja modal pada tahun 2015 yang menurun di bandingkan pada tahun 2014.

4. Berdasarkan dari analisis rasio efesiensi belanja dapat dikata bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Deli Serdang sudah baik dalam setiap penggunaan anggarannya. Hal ini dapat dilihat secara umum bahwa realisasi belanja tidak melebihi pagu anggaran yang telah di tetapkan.

Secara umum hasil dari kinerja belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sudah baik,berkaitan dengan varians belanja. Bedasarkan dengan analisis keserasian belanja dan analisis efesiensi belanja dapat dikatakan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Deli Serdang sudah berhasil dalam menjalankan kinerja anggarannya dengan baik dan efesien.

Analisis keserasian secara keseluruhan menggambarkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Deli Serdang sebagian besar membelanjakan anggarannya untuk belanja operasi dibandingkan belanja modal. Penyerapan anggaran yang dilakukan memiliki dua sisi. Negatif dan positif. Negatif karena bernilai buruk yang artinya pemerintah tidak optimal dalam menetapkan dan memanfaatkan anggaran yang ditetapkan dengan penuh tanggungjawab sedangkan bernilai positif karena baik yang artinya adanya

penghematan yang dilakukan pemerintah untuk selanjutnya dapat kembali digunakan pada tahun anggaran selanjutnya.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Deli Serdang agar semakin meningkatkan kinerja dalam pengelola anggaran belanja daerah secara khusus dan APBD secara umum. Dengan kinerja yang baik maka efektivitas, produktivitas dan efisiensi belanja juga akan semakin baik. Terutama dalam meningkatkan kinerja anggaran agar optimalisasi yang diinginkan segera terlaksana sesuai visi dan misi Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal efisiensi belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang agar lebih mantap dalam meningkatkan pertumbuhan optimal anggaran belanja yang wajar dari tahun sekarang sampai seterusnya.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang sebaiknya mengalokasikan belanja daerah dalam porsi yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andra, B. 2007. Sistem Akuntansi Sektor Publik. PT.Salemba Empat. Jakarta. hal.77
- Anggara, W. A. 2015. Analisis kinerja Belanja Pada badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPADEN) Kota Palembang..Fakultas Ekonomi Universitas IBA. Palembang.
- Grance, L. Y. 2016. Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisa Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuang dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe,Jurnal, Manado.
- Ihsan, Arfan. Dkk. 2014, Metodologi Penelitian Bisnis. Ciptapustaka Media. Bandung.
- Makka, H. 2015. Analisis Kinerja Belanja Daerah dalam Lapoaran Realisasi Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan aset Daerah Kota Kotamobagu. J EMBA.
- Palilingan, A. 2015. Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendapatan Kota Manado.jurnal EMBA.
- Putri, Kharunisa. 2017. Analisis Kinerja Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Mukomuko tahun 2011-2015. Diploma Thesis universitas Andalas. Padang
- Renyowijoyo, M. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Organisasi Nonlaba. Mitra Wancana Media. Jakarta.
- Setio, N. S. 2012, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. PT.Salemba Empat. Jakarta.
- Witra, Sujarweni. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Pustaka Baru. Yogyakarta.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Samsidar Alfira Lubis  
NPM : 1405170721  
Tempat dan Tanggal Lahir : Pasar Bengkel, 18 Desember 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jln.Sunda Dusun IV Bakaran Batu Lubuk Pakam

### Nama Orang Tua

Nama Ayah : Datong Lubis  
Nama Ibu : Rasati  
Alamat : Jln.Sunda Dusun IV Bakaran Batu Lubuk Pakam

### Pendidikan Formal

1. SD Negeri 101900 Tamat Tahun 2008
2. SMP Negeri 1 Lubuk Pakam Tamat Tahun 2011
3. SMA Negeri 1 Lubuk Pakam Tamat Tahun 2014
4. Tahun 2014-2018, tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Maret 2018

**Samsidar Alfira Lubis**